

Evaluasi Kinerja BUMD Kabupaten Purbalingga

Oleh :
Agus Suroso*

Abstract :

The objective of this research is to measure the significant of Municipal Enterprises (BUMD) performance. This research is very important for BUMD management and executive committee of Purbalingga Regency for self-evaluation. Higher performance beside will give the more original income (PAD), it will fullfill the accountability and transparency of public sector.

Population of the research is whole of the BUMD in Purbalingga Regency. We use the judgement method to obtain sampel. Base on that method, we took 3 BUMD, they are PDAM, Apotik Purbahusada and Purbalingga Ventura. The unaudited financial statement as data for measure the performance ratios are Return On Equity (ROE), Return on Investment (ROI), Profitabilty Ratios, and Likuidity Ratios. Result of the research show that the performance of BUMD based on the four indicators ratios have increased.

Keyword : *Performance, Municipal Enterprises*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka setiap pemerintah daerah baik pemerintah daerah propinsi maupun pemerintah daerah kabupaten dituntut untuk mampu membiayai pembangunan daerahnya. Untuk itu maka setiap daerah harus mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya yang dimilikinya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam. Kemampuan untuk menganalisis potensi daerah dan mengoptimalkan secara tepat akan menjadi sumber kekuatan daerah dalam melanjutkan roda pembangunan.

Dalam upaya untuk menggali potensi daerah pemerintah daerah kabupaten Purbalingga mendirikan beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat namun disisi lain Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dua peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini sering menimbulkan permasalahan dalam pengelolaannya, hal ini karena jika Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hanya mengejar fungsi sosial maka fungsi sebagai penyokong sumberdana pembangunan daerah akan menurun, namun disisi lain jika fungsi sebagai penyokong sumber pendapatan daerah ditingkatkan dikhawatirkan fungsi sosial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak akan optimal.

* Dosen Fakultas Ekonomi UNSOED

Sumber permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada awalnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang notabene merupakan uang rakyat, dengan demikian maka kondisi kesehatan keuangan harus dapat disampaikan secara terbuka sebagai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan sebagai dasar untuk perumusan kebijakan permodalan pada masa yang akan datang. Dengan diketahuinya kinerja keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Purbalingga diharapkan akan dapat dirumuskan kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Purbalingga.

Permasalahan yang ada selama ini adalah informasi yang berkaitan dengan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Purbalingga masih sangat terbatas, oleh karena maka perlu dilakukan kajian evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Purbalingga secara menyeluruh baik kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (fungsi sosial).

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi tingkat kesehatan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Purbalingga dalam hubungannya dengan kemampuan untuk menjalankan usahanya dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga ?
2. Seberapa besar tingkat pengembalian modal atas investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik secara finansial maupun secara sosial ?
3. Kebijakan apa yang harus ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mengoptimalkan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik perannya untuk menjalankan fungsi sosial maupun peranan dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui seberapa tingkat kesehatan keuangan dan non keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purbalingga, Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada, Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura.
- b) Tingkat pengembalian modal atas investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik secara finansial maupun secara sosial.
- c) Untuk merumuskan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Purbalingga.

2. Kegunaan Kajian

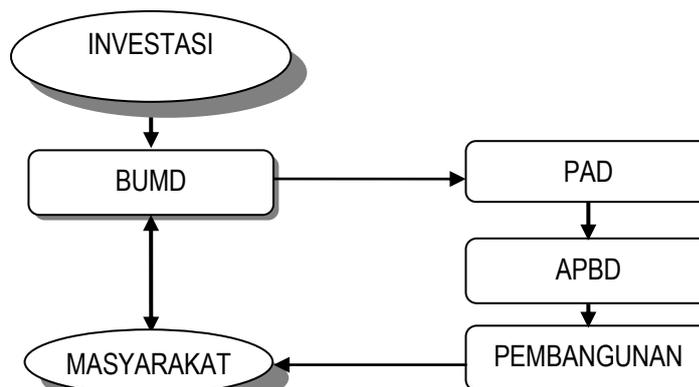
Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Purbalingga dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan penerimaan daerah maupun bagi perbaikan kinerja perusahaan.

D. Kerangka Pemikiran

Pada investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal ada beberapa alasan dari dilaksanakannya kegiatan tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap penerimaan daerah.
2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan usaha yang lain, dalam hal ini usaha yang dilakukan pemerintah adalah sebagai usaha perintis.
3. Merevitalisasi usaha yang dikelola sehingga dapat meningkat kinerjanya di masa yang akan datang.

Gambar 1:
Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Hasil pengembangan

II. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tingkat eksplanasinya jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sasaran penelitian adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purbalingga, Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada Purbalingga, Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumen dan metode survai. Dari studi dokumen diperoleh

gambaran kondisi keuangan perusahaan selama lima tahun terakhir, sedangkan dari pelaksanaan survai dapat diperoleh data, mengenai: hambatan yang dihadapi oleh para manajer perusahaan. Metode pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh. Pemilihan metode sampel jenuh dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara kinerja perusahaan daerah yang ada di Kabupaten Purbalingga. Teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara dan kuesioner. Sedangkan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

B. Metode Analisis Data

Untuk mengukur melakukan evaluasi kinerja perusahaan daerah di kabupaten Purbalingga. Maka dalam penelitian ini digunakan beberapa alat analisis sebagai berikut:

- a. Analisis Rasio Keuangan
- b. Analisis Tabulasi
- c. Analisis SWOT

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN PURBALINGGA

Untuk mengukur kinerja PDAM Purbalingga dilakukan perhitungan menurut Keputusan Mendagri No. 47 tahun 2002. Dalam keputusan Mendagri No. 47 tahun 1999 tersebut dijelaskan mengenai pengukuran kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan menggunakan empat aspek pengukuran, yaitu: (1) aspek keuangan, (2) aspek operasional, dan (3) aspek administrasi. Hasil evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purbalingga berdasarkan tiga aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purbalingga dari Aspek Keuangan**
 - 1.1. Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif**
 - 1.2. Rasio Laba terhadap Penjualan**
 - 1.3. Rasio Aktiva Lancar terhadap Hutang Lancar**
 - 1.4. Rasio Hutang Jangka Panjang terhadap Ekuitas**
 - 1.5. Rasio Total Aktiva terhadap Total Hutang**
 - 1.6. Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi**
 - 1.7. Rasio Laba Operasi Sebelum Biaya Penyusutan terhadap Angsuran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo**
 - 1.8. Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air**
 - 1.9. Jangka Waktu Penagihan Piutang.**

1.10. Efektivitas Penagihan

Untuk mendapatkan nilai kinerja keuangan maka nilai untuk setiap indikator dijumlahkan baik indikator nilai pokok maupun indikator nilai bonus, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1:

Kinerja Keuangan PDAM Kabupaten Purbalingga Tahun 2002-2006

Tahun	Nilai Pokok	Nilai Bonus	Total	Skor Kinerja	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)*45/60	(6)
2002	22	0	22	16,5	
2003	24	6	30	22,5	0,364
2004	30	0	30	22,5	0,000
2005	28	2	30	22,5	0,000
2006	30	0	30	22,5	0,000
Rerata	26,8	1,6	28,4	21,3	0,091

Sumber : Data primer yang diolah

Rata-rata kinerja keuangan PDAM Kabupaten Purbalingga mendapat skor total 21,30. Selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 kinerja keuangan PDAM Kabupaten Purbalingga secara umum relatif stabil yaitu sebesar 22,5 kecuali pada tahun 2002 dimana skor kinerja keuangan hanya sebesar 16,5.

2. Analisis Kinerja PDAM Purbalingga pada Aspek Operasional

Evaluasi kinerja PDAM berdasarkan aspek operasional digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen dalam mengoperasikan prasarana dan sarana penyediaan air bersih yang ada sebagaimana ditunjukkan oleh 10 indikator penilaian, yaitu: (1) cakupan pelayanan, (2) kualitas air distribusi, (3) kontinuitas air, (4) produktivitas pemanfaatan instalasi produksi, (5) tingkat kehilangan air, (6) peneraan meter air, (7) kecepatan penyambungan baru, (8) kemampuan penanganan pengaduan rata-rata per bulan, (9) kemudahan pelayanan, dan (10) rasio karyawan per 1.000 pelanggan.

- 2.1. Cakupan Pelayanan
- 2.2. Kualitas Air Distribusi
- 2.3. Kontinuitas Air
- 2.4. Produktivitas Pemanfaatan Instalasi Produksi.
- 2.5. Tingkat Kehilangan Air
- 2.6. Peneraan Meter Air
- 2.7. Kecepatan Penyambungan Baru
- 2.8. Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-Rata Per Bulan
- 2.9. Kemudahan Pelayanan
2. 10. Rasio Karyawan Per 1000 Pelanggan

Tabel 2:
Nilai Kinerja Dari Aspek Operasional PDAM Kabupaten Purbalingga Tahun 2002-2006

Tahun	Nilai Pokok	Nilai Bonus	Total	Skor Kinerja	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4) x 40:47	(6)
2002	19	2	21	14	-
2003	19	2	21	17,87	0,276
2004	19	1	20	17,02	-0,048
2005	19	1	20	17,02	0,000
2006	21	2	23	19,57	0,150
Rerata	19,4	1,6	21	17,096	0,095

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat nilai aspek operasional yang dicapai PDAM Kabupaten Purbalingga pada tahun 2003, mengalami penurunan sebesar -0,048 persen, namun secara umum rata-rata selama lima tahun aspek operasional mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,095 persen. Peningkatan kinerja yang cukup menonjol terjadi pada tahun 2003 yaitu mencapai 0,276 dan pada tahun 2006 yang mencapai 0,150.

3. Analisis Kinerja PDAM Purbalingga pada Aspek Administrasi

Evaluasi kinerja ditinjau dari aspek administrasi digunakan untuk menilai keberhasilan manajemen yang meliputi perencanaan, pengendalian dalam mengelola PDAM yang ditunjukkan dengan 10 indikator, yaitu: (1) rencana jangka panjang, (2) rencana organisasi dan uraian tugas, (3) pedoman penilaian kinerja karyawan, (4) gambar nyata laksana, (5) pedoman penilaian kinerja karyawan, (6) rencana kerja dan anggaran perusahaan, (7) tertib laporan internal, (8) tertib laporan eksternal, (9) opini auditor independen, dan (10) tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.

- 3.1. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)
- 3.2. Rencana Organisasi dan Uraian Tugas
- 3.3. Prosedur Operasi Standar
- 3.4. Gambar Nyata Laksana (*As Built Drawing*)
- 3.5. Pedoman Penilaian Kinerja Karyawan
- 3.6. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
- 3.7. Tertib Laporan Internal
- 3.8. Tertib Laporan Eksternal
- 3.9. Opini Auditor Independen
- 3.10. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Terakhir

Perhitungan rasio dan nilai kinerja dari 10 indikator dalam aspek administrasi dari tahun 2002, secara keseluruhan nilai dari aspek administrasi dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3:
Nilai Kinerja Dari Aspek Administrasi PDAM Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 - 2006

Tahun	Nilai Pokok	Skor Kinerja	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)=(2)x(15:36)	(4)
2002	26	10,83	-
2003	24	10,00	-7,66
2004	24	10,00	0,00
2005	26	10,83	8,30
2006	28	11,67	7,76
Rerata	25,6	10,666	2,10

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat nilai aspek administrasi yang dicapai PDAM Kabupaten Purbalingga dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 secara umum mengalami peningkatan sebesar 2,10 persen. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2005 yang mencapai 8,30 persen namun pada tahun 2003 justru mengalami penurunan kinerja yaitu 7,66 persen.

4. Kinerja PDAM Kabupaten Purbalingga Secara Keseluruhan

Tabel 4:
Kinerja PDAM Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 - 2006

Tahun	Aspek Penilaian			Total	Kriteria
	Keuangan	Operasional	Administrasi		
2002	16,50	14,00	10,83	41,33	Sedang
2003	22,50	17,87	10,00	50,37	Cukup
2004	22,50	17,02	10,00	49,52	Cukup
2005	22,50	17,02	10,83	50,35	Cukup
2006	22,50	19,57	11,67	53,74	Cukup
Rerata	21,30	17,09	10,67	49,06	Cukup

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa kinerja PDAM Kabupaten Purbalingga pada tahun 2002 berada pada interval 30 sampai dengan 45 sehingga masuk dalam kategori sedang. Sedangkan kinerja antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 berada pada interval antara 45 sampai dengan 60 sehingga masuk dalam kategori cukup. Kinerja PDAM Purbalingga ini secara terus mengalami peningkatan terutama pada tahun 2006 yang mengalami peningkatan

dari nilai kinerja sebesar 10,83 menjadi 11,67 yang disebabkan karena adanya peningkatan dalam bidang operasional dan administrasi.

5. Analisis SWOT PDAM Kabupaten Purbalingga

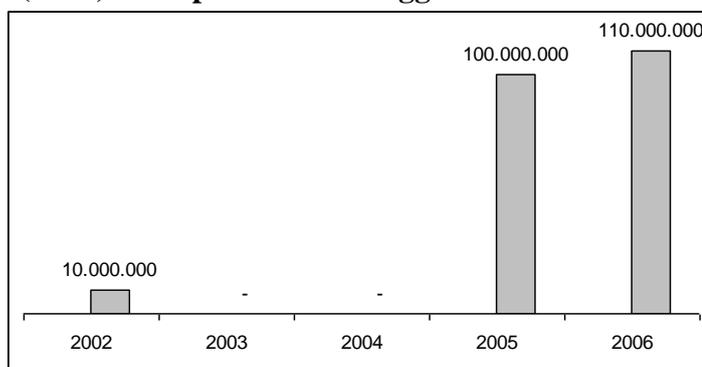
Tabel 5:
Internal dan Eksternal Faktor PDAM Kabupaten Purbalingga

<p><i>Internal Factor Analysis</i> IFAS</p> <p><i>Eksternal Factor Analysis</i> EFAS</p>	<p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah karyawan yang cukup (121 orang). ▪ Rata-rata usia karyawan relatif muda. ▪ Latar belakang pendidikan karyawan yang cukup baik. ▪ Tegasnya perusahaan dalam menerapkan peraturan kepegawaian. ▪ Dll 	<p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya tingkat profesionalisme karyawan dalam melaksanakan tugas. ▪ Pengelolaan jaringan yang masih kurang. ▪ Penetapan tarif yang masih sangat murah. ▪ Biaya operasional yang cukup tinggi. ▪ dll
<p>Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya peluang untuk meningkatkan kualitas SDM dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan perpamsi dan perguruan tinggi. ▪ Adanya peluang untuk menambah jaringan baru. ▪ Kapasitas dan sumber belum dimanfaatkan secara maksimal. 	<p>SO Strategy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memperluas jaringan distribusi. ▪ Melakukan penyesuaian tarif. ▪ Memaksimalkan kapasitas sumber air. ▪ Membuka bisnis air minum dalam kemasan. ▪ Meningkatkan kualitas SDM melalui program pendidikan dan pelatihan. 	<p>WO Strategy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan efisiensi pada bidang operasional. ▪ Peningkatan pengelolaan jaringan. ▪ Meningkatkan profesionalisme karyawan dengan memberikan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang jelas.
<p>Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lemahnya transformasi teknologi. ▪ Adanya potensi kerusakan jaringan yang cukup besar akibat perilaku negatif sebagian masyarakat. ▪ Dengan adanya otonomi daerah akan menimbulkan klaim dari masyarakat disekitar sumber air. 	<p>ST Strategy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelenggarakan pelatihan untuk mempercepat transfer teknologi. ▪ Tingkatkan kualitas pelayanan dari para karyawan melalui pengembangan kepribadian untuk menjaga hubungan baik dengan para nasabahnya. ▪ Optimalkan fungsi pos pelayanan untuk menghadapi agresifitas pesaing 	<p>WT Strategy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menjaga dan memelihara jaringan. ▪ Memperkuat kedudukan hukum disekitar sumber air. ▪ Meningkatkan kualitas infrastruktur pada daerah-daerah rawan bencana. ▪ Meningkatkan profesionalisme pegawai.

6. Kontribusi PDAM Kabupaten Purbalingga Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga

Gambar 2:

Kontribusi PDAM Kabupaten Purbalingga Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 – 2006



Sumber : Hasil Audit Kinerja PDAM Kab. Purbalingga, 2006

B. EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH APOTIK PURBA HUSADA PURBALINGGA

Evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada di Kabupaten Purbalingga menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-100/MBU/2002 tentang Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

1. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada Kabupaten Purbalingga dari Aspek Keuangan

Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada Kabupaten Purbalingga dari Aspek Keuangan menggunakan indikator rasio-rasio keuangan sebagai berikut: (1) imbalan kepada pemegang saham (*ROE*), (2) imbalan investasi (*ROI*), (3) rasio kas, (4) rasio lancar, (5) *collection periods*, (6) perputaran total asset, dan (7) rasio modal sendiri terhadap total aktiva.

- 1.1. Perkembangan Rasio Laba Setelah Pajak terhadap Modal Sendiri/*Return On Equity (ROE)*.
- 1.2. Perkembangan Rasio Laba Sebelum Pajak ditambah Penyusutan terhadap Capital Employed/*Return On Investment (ROI)*
- 1.3. Perkembangan Rasio Kas terhadap Hutang Lancar /*Cash Ratio (CR)*
- 1.4. Perkembangan Rasio Aktiva Lancar terhadap Hutang Lancar /*Curent Ratio (CR)*
- 1.5. Perkembangan Rasio Piutang Usaha terhadap Total Pendapatan Usaha/*Collection Period (CP)*
- 1.6. Perkembangan Rasio Total Persediaan terhadap Total Pendapatan Usaha/*Peputaran Persediaan*.

- 1.7. Perkembangan Rasio Total Pendapatan terhadap Modal yang digunakan/*Total Asset Turn Over* (TATO).
- 1.8. Perkembangan Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset.

2. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada Kabupaten Purbalingga dari Aspek Operasional.

Dalam pengukuran kinerja Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada Kabupaten Purbalingga dari aspek operasional digunakan tiga indikator yaitu: (1) indikator pelayanan kepada masyarakat. (2) indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia. dan (3) indikator *research* dan *development*. Pengukuran kinerja Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada Kabupaten Purbalingga dari aspek operasional menggunakan kuesioner baik kuesioner terbuka maupun kuesioner tertutup.

- 2.1 Indikator Pelayanan Kepada Masyarakat
- 2.2 Indikator Peningkatan Kualitas SDM
- 2.3 Indikator *Research* dan *Development*

3. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada Kabupaten Purbalingga dari Aspek Administrasi.

Evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada Kabupaten Purbalingga dari aspek administrasi digunakan untuk mengukur ketertiban administrasi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dalam pengukuran kinerja Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada Kabupaten Purbalingga dari aspek administrasi digunakan tiga indikator yaitu: (1) indikator penyampaian laporan perhitungan tahun 2004. (2) indikator penyampaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, (3) indikator penyampaian laporan periodik. Pengukuran kinerja Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada Kabupaten Purbalingga dari aspek operasional menggunakan kuesioner baik kuesioner terbuka maupun kuesioner tertutup.

- 3.1 Indikator Penyampaian Laporan Tahunan Tahun 2006
- 3.2 Indikator Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2006
- 3.3 Indikator Penyampaian Laporan Periodik Tahun 2006

4. Kinerja Perusda Apotik Purba Husada Kabupaten Purbalingga Secara Keseluruhan

Sesuai dengan klasifikasi umum yang diatur dalam SK Menteri BUMN No. KEP.100/MBU/2002 maka kinerja Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 ditinjau dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6:
Kinerja Perusda Purba Husada Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 - 2006

Tahun	Aspek Penilaian			Total	Kriteria
	Keuangan	Operasional	Administrasi		
2002	30	n.a	n.a	30	Cukup*
2003	41,5	n.a	n.a	41,5	Cukup*
2004	41	n.a	n.a	41	Cukup*
2005	40	n.a	n.a	40	Cukup*
2006	44	30	6	80	Baik
Rerata	39				

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa kinerja Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada pada tahun 2006 memiliki kinerja yang baik, hal ini disebabkan karena skor pada indikator aspek operasional sangat besar yaitu 30 dari nilai maksimal sebesar 35, sedangkan skor pada indikator aspek keuangan hanya 44 dari nilai maksimal sebesar 70 sehingga masuk kategori cukup, sedangkan skor pada aspek administrasi sebesar 5 dari total maksimal sebesar 15.

5. Analisis SWOT Perusda Apotik Purba Husada Kabupaten Purbalingga

Tabel 7:

Internal dan Eksternal Apotik Purba Husada Kabupaten Purbalingga

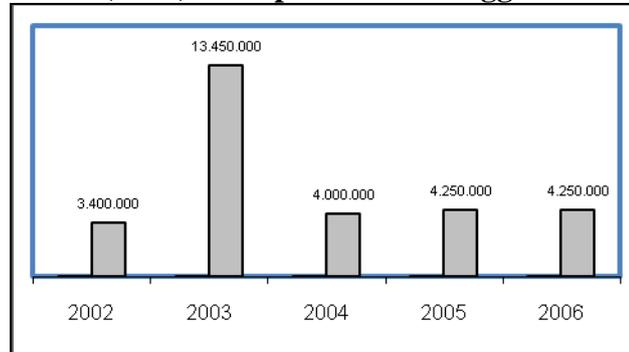
<p><i>Internal Factor Analysis</i> IFAS</p> <p><i>Eksternal Factor Analysis</i> EFAS</p>	<p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Letak apotik yang sangat strategi. ▪ Permodalan kuat karena didukung oleh Pemda Kab. Purbalingga. 	<p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Karyawan ada yang tidak dapat hadir secara <i>full time</i> karena telah diangkat menjadi CPNS. ▪ Prosedur ke pemda yang membeli tidak kondusif. ▪ Belum jelasnya status kepegawaian pada apotik Purba Husada, karena belum ada keputusan resmi dari Bupati.
<p>Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pasar akan obat-obatan di purbalingga masih sangat luas. ▪ Kecenderungan masyarakat untuk melakukan swamedikasi langsung ke apotik.. 	<p>SO Strategy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kerjasama dengan dokter dan rumah sakit.. ▪ Meningkatkan strategi promosi. ▪ Meningkatkan ketersediaan berbagai jenis obat. ▪ Melakukan sistem penjemputan resep dan penghantaran obat. 	<p>WO Strategy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan profesionalisme karyawan dengan memberikan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang jelas.
<p>Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Semakin tingginya campur tangan pemilik modal dalam pengelolaan apotik. ▪ Semakin banyaknya apotik yang berada di wilayah kabupaten Purbalingga. 	<p>ST Strategy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan <i>benchmarking</i> terhadap harga yang ditetapkan pesaing. ▪ Meningkatkan independensi dalam pengelolaan apotik. 	<p>WT Strategy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan profesionalisme pegawai.

Sumber : Data primer

6. Kontribusi Perusda Apotik Purba Husada Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sebagai salah satu perusahaan daerah dimana permodalan berasal dari pemerintah daerah yang notabene berasal dari rakyat, maka Perusahaan Daerah Purba Husada dituntut untuk dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga. Dalam gambar berikut disajikan perkembangan kontribusi Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

Gambar 3:
Kontribusi Perusda Apotik Purba Husada Kabupaten Purbalingga Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 – 2006



Sumber : Data primer yang diolah

7. Kebijakan terhadap Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada Kabupaten Purbalingga

Kontribusi Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 juga dinilai masih terlalu rendah jika dibandingkan besarnya aset yang dikelola. Pada tahun 2006 besarnya aset Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada sebesar Rp. 170.665.442 sedangkan kontribusi Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga pada tahun tersebut hanya sebesar Rp.4.250.000 atau hanya sebesar 2,49 persen.

Berdasarkan pada uraian tersebut maka perlu adanya evaluasi secara mendalam terhadap keberadaan Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada, dengan mempertimbangkan aspek *cost* dan *benefit* baik dilihat dari sisi ekonomi maupun non ekonomi.

C. EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN DAERAH PURBALINGGA VENTURA

Evaluasi kinerja keuangan Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura pada aspek operasional dan aspek administrasi di Kabupaten Purbalingga menggunakan pedoman berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-100/MBU/2002 tentang Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan pada aspek keuangan menggunakan pengukuran kinerja kesehatan lembaga keuangan seperti Surat Keputusan No. 30/12/KEP/DIR/1997 tentang pengukuran tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hal ini karena Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura sebagai lembaga keuangan memiliki kekahasan tersendiri. Namun tidak semua indikator keuangan dalam Surat Keputusan No. 30/12/KEP/DIR/1997 digunakan, hal ini karena laporan keuangan yang disusun oleh Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura tidak memuat informasi lengkap yang dapat digunakan untuk mengukur semua indikator kinerja berdasarkan keputusan tersebut.

1. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga dari Aspek Keuangan

Dalam keputusan Surat Keputusan No. 30/12/KEP/DIR/1997 tentang pengukuran tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdapat beberapa penilaian indikator keuangan berikut: (1) *Non Performing Loan (NPL)*, (2) Tingkat Kolektibilitas (*TK*), (3) *Return on Asset (ROA)*, (4) *Loan Deposit Ratio (LDR)*, (5) Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi (*BOPO*), (6) *Net Interest Margin (NIM)*, (7) Rasio Kewajiban Kepemilikan Modal Minimal (*KPMM*). Namun dalam penelitian ini *Non Performing Loan (NPL)* dan Tingkat Kolektibilitas (*TK*) tidak dilakukan pengukuran hal ini karena keterbatasan laporan keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura.

- 1.1. Perkembangan Rasio Laba Setelah Pajak terhadap Total Aset/*Return On Asset (ROA)*
- 1.2. Perkembangan Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi / (*BOPO*)
- 1.3. Rasio *Net Interest Margin/ (NIM)*
- 1.4. Perkembangan *Loan Deposit Ratio (LDR)*.
- 1.5. Perkembangan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (*KPMM*).

2. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga dari Aspek Operasional.

Seperti halnya dalam evaluasi kinerja pada Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada, evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga dari aspek operasional juga menggunakan tiga indikator yaitu: (1) pelayanan kepada masyarakat. (2) peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan (3) *research* dan *development*. Pengukuran kinerja Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga dari aspek operasional juga menggunakan kuesiner baik kuesioner terbuka maupun kuesioner tertutup yang ditujukan kepada manajer Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura.

- 2.1 Indikator Pelayanan Kepada Masyarakat
- 2.2 Indikator Peningkatan Kualitas SDM
- 2.3 Indikator *Research* dan *Development*

3. Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga dari Aspek Administrasi.

Evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga dari aspek administrasi digunakan untuk mengukur ketertiban administrasi perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dalam pengukuran kinerja Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga dari aspek administrasi digunakan tiga indikator yaitu: (1) penyampaian laporan perhitungan perhitungan 2006, (2) penyampaian rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, (3) indikator penyampaian laporan periodik. Pengukuran kinerja Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga dari aspek

operasional menggunakan kuesiner baik kuesioner terbuka maupun kuesioner tertutup yang ditujukan kepada manajer perusahaan.

- 3.1 Indikator Penyampaian Laporan Perhitungan Tahun 2006
- 3.2 Indikator Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2006
- 3.3 Indikator Penyampaian Laporan Periodik Tahun 2006

4. Kinerja Perusda Apotik Purba Husaha Kabupaten Purbalingga Secara Keseluruhan

Sesuai dengan klasifikasi umum yang diatur dalam SK Menteri BUMN No. KEP.100/MBU/2002 maka kinerja Purbalingga Ventura tahun 2006 ditinjau dari aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8:

Kinerja Perusda Purba Husada Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 - 2006

Tahun	Aspek Penilaian			Total	Kriteria
	Keuangan	Operasional	Administrasi		
2002	17,00	n.a	n.a	17,00	Cukup*
2003	14,00	n.a	n.a	14,00	Cukup*
2004	20,00	n.a	n.a	20,00	Baik*
2005	20,00	n.a	n.a	20,00	Baik*
2006	20,00	28	13	61,00	Baik
Rerata	18,40				

Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa kinerja Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 memiliki kinerja yang baik. Kriteria penilaian baik pada tahun 2006 hal ini disebabkan karena skor pada indikator aspek operasional sangat besar yaitu 28 dari nilai maksimal sebesar 35, sedangkan skor pada indikator aspek keuangan 20 dari nilai maksimal sebesar 25 sehingga masuk kategori cukup, sedangkan skor pada aspek administrasi sebesar 13 dari total maksimal sebesar 15.

Seperti halnya evaluasi kinerja pada Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada, evaluasi kinerja pada Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 juga hanya dilakukan pada aspek keuangan saja, hal ini disebabkan kurangnya dokumen yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja pada aspek administrasi dan aspek operasional pada tahun-tahun tersebut. Kriteria evaluasi kinerja aspek keuangan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 masuk dalam kategori cukup. Rendahnya skor pada aspek keuangan pada Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura disebabkan karena rendahnya nilai rasio total pendapatan terhadap modal yang digunakan.

5. Analisis SWOT Perusda Purbalingga Ventura

Tabel 9:

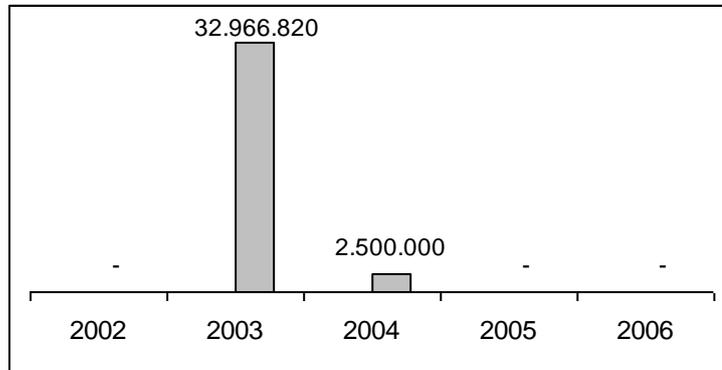
Internal dan Eksternal Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga

<p><i>Internal Factor Analysis</i> IFAS</p> <p><i>Eksternal Factor Analysis</i> EFAS</p>	<p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingginya sumber permodalan. ▪ Tingginya kamauan karyawan untuk mengembangkan usaha. ▪ Rasa memiliki perusahaan yang tinggi. 	<p>Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyaknya pembiayaan yang macet. ▪ Tidak efektifnya usaha-usaha pendampingan. ▪ Sistem perhitungan bagi hasil yang masih menggunakan sistem flat.
<p>Peluang</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih luasnya pasar yang siap digarap. ▪ Keinginan yang kuat dari karyawan Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura untuk mengembangkan perusahaan menjadi BPR. ▪ Adanya niat baik dari pemerintah daerah untuk menambah modal. 	<p>SO Strategy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan promosi. ▪ Memperluas jangkauan pemasaran. ▪ Melakukan <i>benchmarking</i> terhadap kebijakan dan strategi pesaing. 	<p>WO Strategy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan efektifitas program pendampingan. ▪ Meningkatkan penggunaan teknologi modern. ▪ Meningkatkan hubungan baik dengan dinas dan Perusaan Pasangan Usaha (PPU)
<p>Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Semakin ketatnya tingkat persaingan dengan bank-bank, BPR, BMT dan Koperasi simpan pinjam. ▪ Kebijakan yang belum mendukung keberadaan Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura. ▪ Banyanya rentenir/bank kloyong yang meresahkan masyarakat. 	<p>ST Strategy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kualitas dan kuantitas program pendampingan. ▪ Meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat bersaing dengan BPR, BMT dan Koperasi. 	<p>WT Strategy</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengubah sistem perhitungan bagi hasil dari sitem flat ke simtem bagi hasil murni. ▪ Meningkatkan selektifitas dalam pemberian permodalan. ▪ Meningkatkan konsolidasi kedalam dengan tetap melakukan pencegahan agar Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) tidak lari ke lembaga keuangan lainnya.

6. Kontribusi Perusda Purbalingga Ventura Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan daerah, maka Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura juga memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang program pembangunan. Hal ini karena permodalan perusahaan daerah pada dasarnya merupakan uang rakyat maka pemakiannya juga harus memberikan manfaat secara optimal kepada masyarakat. Pada gambar berikut disajikan perkembangan kontribusi Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga:

Gambar 4:
Kontribusi Perusda Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga Terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2002 – 2006



Sumber : Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel berikut pada tabel di atas terlihat bahwa rata-rata kontribusi Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 hanya sebesar Rp. 7.093.364. Kecilnya nilai rata-rata kontribusi Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga disebabkan pada tahun 2002, 2005 dan tahun 2006 tidak melakukan penyetoran kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga hal ini karena perusahaan pada tahun tersebut masih minus atau belum laba secara akumulasi sejak tahun 2002.

7. Kebijakan terhadap Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura pada tahun 2006 masuk dalam kategori cukup. Hal ini disebabkan karena masih relatif rendahnya tingkat pengembalian perusahaan dibandingkan dengan modal yang diberikan. Namun demikian dalam operasinya dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura sudah mampu menghasilkan keuntungan, sehingga keuntungan ini dapat terus digunakan untuk mengembangkan usahanya.

Berdasarkan pada uraian tersebut maka keberadaan Perusahaan daerah Purabalingga Ventura perlu dipertahankan, untuk memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mendapatkan sumber permodalan. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga maka sistem pembagian kontribusi didasarkan pada persentase yang dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas maka dapat ditarik dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purbalingga memiliki kinerja yang cukup, dan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan fungsi sosialnya untuk menyediakan kebutuhan air minum bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga serta mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga.
2. Perusahaan Daerah Apotik Purba Husada Kabupaten Purbalingga memiliki kinerja yang cukup, dan akan tetapi peranan dalam menyediakan obat-obatan dapat dijalankan dengan baik oleh pihak swasta disamping itu kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga masih sangat kecil dibandingkan dengan aset yang dikelola.
3. Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura memiliki kinerja yang cukup akan tetapi memiliki kecenderungan kinerja yang baik hal ini ditunjukkan dengan rasio laba terhadap modal sendiri yang baik, namun peranannya dalam menyediakan jasa permodalan telah dapat dijalankan oleh PD. BPR BKK Purbalingga.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi penelitian sebagai berikut:

1. Keberadaan PDAM Kabupaten Purbalingga sebagai perusahaan daerah harus tetap dipertahankan dengan melihat adanya kecenderungan peningkatan kinerja dan perannya yang sangat penting dalam penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga.
2. Peningkatan kinerja keuangan pada PDAM Kabupaten Purbalingga dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pendapatan dengan mengoptimal pengelolaan unit usaha lainnya seperti pencucian mobil dan air minum dalam kemasan. Disamping itu perlu adanya kegiatan klasifikasi ulang pelanggan sehingga akan meningkatkan prinsip-prinsip keadilan bagi pelanggan dan akan meningkatkan pendapatan PDAM Kabupaten Purbalingga.
3. Keberadaan Apotik Purba Husada sebagai perusahaan daerah perlu ditinjau ulang dengan melihat adanya rasio laba terhadap ekuitas yang negatif dan peranannya sebagai penyedia obat sudah dapat digantikan dengan baik oleh apotik swasta. Disamping itu kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga masih sangat kecil tidak sebanding dengan aset yang dikelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Riyanto. 1990. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPFE-Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-100/MBU/2002 tentang *Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negera*.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang *Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum*
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR/1997 tentang *Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*.